



Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial (Belajar dari Pengalaman Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat)

Oleh

Saidin Ernas, Zuly Qodir¹

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinamika sosial kemasyarakatan di Papua ternyata tidak selalu menghadirkan cerita tentang konflik dan disintegrasi, tetapi juga tentang harmoni dan perdamaian sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Fakfak di Prop. Papua Barat. Dengan metode deskriptif analysis terhadap data-data kualitatif yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi, penulis berhasil memperoleh beberapa temuan penting. Pertama, agama dan budaya berperan penting dalam melahirkan norma-norma sosial yang harmonis yang mempengaruhi praktik-praktik sosial individu hingga pada arena sosial yang lebih luas seperti politik dan ekonomi. Kedua, proses pelebagaan nilai dan norma didukung oleh pemerintah dan kekuatan civil society yang memiliki misi yang sama untuk mempromosikan harmoni dan perdamaian. Namun tulisan ini juga mengingatkan bahwa isu-isu konflik, seperti separatisme dan radikalisme agama, bila tidak ditangani dengan hati-hati bisa merusak integrasi sosial di Fakfak.

Kata kunci: integrasi sosial, agama, budaya

Abstract

This paper aims to explain that social dynamic of citizenship in Papua actually doesn't always present story about conflict and social integration, but it also tells about harmony and peace as happening in the society of Fakfak, West Papua Province. By using analyses descriptive method toward qualitative data collected through field observation, interview, and documentation study, the writer succeeded in obtaining some important information. First, religion and culture have important roles in building harmonically social norms influencing social behavior of the individuals at the larger social arena such as politic and economic. Second, process of the institutionalization of value and norm is supported by the government and this writing also reminds that conflict issues, such as separatism and religious radicalism, if those are not handled well can break social integration in Fakfak

Keywords: social integration, religion, and culture

A. Pendahuluan

Sejauh ini studi tentang perdamaian di Papua masih dianggap sebagai sesuatu yang kurang menarik dan seksi, karena dianggap keluar dari opini dominan yang telah menkonstruksi Papua sebagai wilayah konflik yang paling panas di Indonesia. Para peneliti

ilmu sosial dan dunia akademik seakan terjebak pada diskursus konflik yang cenderung hegemonik itu, sehingga berbagai penelitian tentang Papua lebih menyoroti dinamika konflik dan kekerasan (CSIS, 2006, LIPI, 2009). Orang Papua masih dilihat sebagai objek yang diam atau tidak punya

¹ Saidin Ernas adalah kandidat Doktor Program Studi Agama dan Lintas Budaya, UGM, dan dosen Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Zuly Qodir adalah staf pengajar pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya UGM.

prakarsa untuk menggagas perdamaian. Rentetan konflik politik, sosial dan ekonomi yang memanjang sejak integrasi Papua dengan Indonesia, dikonstruksikan sebagai narasi dominan yang memperlihatkan kesulitan untuk membangun perdamaian Papua berdasarkan inisiatif lokal. Padahal masyarakat Papua pada dasarnya memiliki kekuatan dari dalam untuk mengelola konflik sosial dan kekerasan dengan cara-caranya sendiri yang kemudian terbukti sukses mengendalikan konflik dan kekerasan, sebagaimana yang terjadi dengan masyarakat di wilayah Fakfak, Propinsi Papua Barat.

Situasi harmonis di Fakfak dan sekitarnya menunjukkan bahwa terdapat dinamika konflik dan integrasi yang terjadi secara berbeda pada setiap wilayah di Papua. Pada kasus Fakfak, integrasi sosial dapat berjalan dengan baik karena ada berbagai faktor yang mendukungnya. Integrasi dibangun secara kultural di atas kesadaran dan inisiatif lokal, sehingga memiliki makna dan kekuatan dari dalam untuk merawat keragaman, baik agama, budaya, maupun perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Hal ini berbeda dengan konsepsi integrasi sosial yang selama ini dipahami dan dipraktikkan selama kurun waktu kekuasaan Orde Baru (1971-1998). Keragaman di dalam masyarakat selalu dipersepsikan sebagai sumber konflik yang mesti ditangani dengan cara-cara yang hegemonik, yaitu melakukan penyeragaman dengan memaksakan identitas nasional yang tunggal.

Model integrasi sosial yang dipaksakan melalui berbagai instrumen kekuasaan, tentu menafikkan kemungkinan adanya nilai-nilai tertentu yang mampu mendorong masyarakat untuk

mengelola perbedaan dengan cara-cara yang tepat, sehingga melahirkan integrasi dan harmoni sosial yang otentik dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat di berbagai daerah berhasil membangun dan menciptakan harmoni sosial melalui mekanisme kultural yang dibangun di atas norma-norma, nilai-nilai dan moralitas budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sebut saja misalnya tradisi Bela Baja di Pantar Nusa Tenggara Timur yang menjadi pengikat persaudaraan antara umat Islam dan Kristen (Rita Pranawati, 2011), atau tradisi Pela Gandong di Maluku Tengah yang membantu proses penyelesaian konflik di Maluku (Ernas, 2006). Demikian juga tradisi Satu Tungku Tiga Batu di Fakfak Papua Barat (Iribaram, 2011). Namun berbagai kearifan lokal tersebut masih dipandang sebelah mata, karena dianggap tidak cukup kuat dan teruji untuk menyelesaikan konflik. Cara pandang seperti ini menyebabkan pemerintah cenderung mengabaikan cara-cara lokal dalam penyelesaian konflik.

Hal ini misalnya dapat diamati secara jelas dalam proses penanganan masalah-masalah di Papua yang berlangsung selama ini. Pemerintah cenderung mengedepankan proses politik dan kekuasaan. Padahal konflik Papua telah berkembang dengan dinamika yang sangat kompleks. Dari masalah historis yang berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI yang disebut sebagai integrasi yang terlambat - *the late integration* (Jacques Bernard, 2004), hingga soal kegagalan pembangunan, diskriminasi sosial, dan kekerasan politik dan pelanggaran HAM (Muridan S. Widjono, 2009:3-19). Kegagalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang saling terkait dengan

politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama di Papua, semestinya mendorong kita untuk mengkaji berbagai alternatif lain dalam menyelesaikan masalah Papua. Dalam dimensi tertentu kita dapat belajar dari fenomena damai dan harmonis yang terjadi di Fakfak dan sekitarnya, dimana perdamaian dan harmonisasi melibatkan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang mengikat mereka dalam keseimbangan, sehingga relasi sosial yang terbentuk adalah keberadaan (ko-eksistensi), kerjasama (kolaborasi) dan kerekatan (kohesi) yang membentuk integrasi sosial.

Apa yang terjadi di Fakfak tentu menarik untuk dikaji dan diteliti, di tengah harapan untuk mengelola konflik yang terjadi di Papua dengan cara-cara yang lebih baik, beradab, demokratis dan bisa diterima oleh semua kekuatan social politik di Papua. Dalam kaitan itu, maka kajian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu di dalam integrasi sosial di Fakfak? Bagaimanakah proses pelebagaan nilai-nilai integrasi tersebut sehingga membentuk kehidupan sosial yang damai dan harmonis? Dan terakhir studi ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat Fakfak, ditengah perubahan sosial yang terus terjadi di Papua dewasa ini?

B. Teorisasi Konsep Integrasi

Secara umum teori utama yang dipilih sebagai grand theory dalam memahami fenomena yang menjadi locus penelitian ini, yakni teori integrasi sosial (*social integration*). Namun untuk menjelaskan kasus integrasi sosial yang terjadi di Fakfak, maka grand theory tersebut akan diperkuat oleh beberapa

teori dan konsep lain yang memiliki relevansi, seperti teori tentang konflik dan konsensus serta teori reproduksi sosial. Berikut ini akan dijelaskan aspek signifikan dari konsep-konsep tersebut sehingga membentuk sebuah kerangka teoritik yang diperlukan untuk menjelaskan dinamik integrasi sosial yang terjadi pada masyarakat Fakfak.

Secara sosiologis teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan Talcott Parson (1927-1979). Paradigma ini mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (ekuilibrium). Hal ini tercermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial yaitu, pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan kedua, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial (Ritzer, 2009:258). Biku Parekh (2008:84-87) menyebutkan bahwa proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat hanya dapat tercipta bila terpenuhi tiga prasyarat utama. Pertama, adanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial (*moral contract*). Kedua, sebagian terhimpun dalam berbagai unit sosial, saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Hal ini untuk menjaga terjadinya dominasi dan penguasaan dari kelompok mayoritas atas minoritas. Ketiga, terjadi saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Kontrak moral (*a moral contract*) adalah ketaatan

terhadap nilai-nilai yang menjadi platform bersama dalam masyarakat, sehingga membentuk semacam kepemilikan bersama atas nilai-nilai tersebut. Ia menjadi titik temu perbedaan yang harus ditaati untuk menjamin tegaknya perdamaian. Ketaatan pada moral contract akan menempatkan masyarakat pada kondisi yang equal, sebab masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dalam kehidupan sosial (Parekh, 2008).

Proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat tentu tidak menafikkan adanya konflik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fenomena sosial dan perubahan. Sebab konflik, seperti yang dijelaskan Ralf Dahrendorf adalah fenomena sosial yang selalu hadir (*inherent omni presence*) dalam setiap masyarakat manusia (Ritzer, 2009). Dengan kata lain konflik yang hebat sekalipun memiliki peluang untuk dapat dipadamkan atau didamaikan dengan mengkombinasikan dua pola sekaligus. Pertama, membangun konsensus yang mempertemukan “kepentingan-kepentingan” kelompok yang bertikai tersebut kedalam sebuah tatanan kekuasaan yang bisa mengurangi perbedaan (Maswadi Rauf, 2000:15. Kedua, melakukan usaha yang serius untuk mendorong penguatan kembali nilai-nilai kebersamaan yang disebut Parekh (2008:87) sebagai “kontrak moral” antar kelompok dan individu dalam sebuah masyarakat majemuk.

Pierre Bourdieu (1930-2002), menawarkan konsep habitus dan *field* (ranah) untuk menganalisis kontestasi nilai dan norma dalam ruang sosial yang luas. Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Menurut Bourdieu (1977:72), individu menggunakan habitus untuk berhubungan dengan

realitas sosial karena ia telah dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia sosial. Seperti konsepsi tentang benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak berguna, terhormat-terhina (Mohammad Adib, 2012:97). Adapun *field* (ranah) merupakan jaringan relasional antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Oleh karena itu ranah bukan ikatan intersubyektif antara individu, namun semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu. Ranah merupakan metafora yang digunakan Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya (Ritzer dan Goodman, 2010:582-590). Praksis dari kerangka konseptual Bourdieu ini memiliki relevansi untuk menjelaskan fenomena harmoni sosial yang terbentuk pada masyarakat Fakkak. Sebab sebuah masyarakat yang teratur dan harmonis merupakan perwujudan dari adanya sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang cenderung menghindari konflik dan adanya ruang sosial yang mendukung untuk terwujudnya kondisi tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk mengetahui dinamika sosial pada masyarakat Fakkak di Propinsi Papua Barat, sehingga mengantarkan masyarakat pada sebuah kondisi sosial yang harmonis dan damai. Oleh sebab itu, asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa

integrasi dan harmoni yang terjadi di Fakfak tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu; (1) Fakfak memiliki sejumlah karakteristik dan keunikan dibandingkan wilayah lainnya di Papua sehingga dinamika intergasi sosial yang tercipta memiliki keberhasilan yang sangat tinggi; (2) budaya dalam masyarakat Fakfak merupakan modal sosial yang sangat penting strategis sehingga mampu merekatkan perbedaan-perbedaan agama, etnisitas, pandangan dan status ekonomi dalam satu hubungan sosial yang harmonis; (3) di Fakfak nilai-nilai kultural tersebut sudah dapat dilembagakan dalam sistem pemerintahan, politik dan ekonomi sehingga memberikan jaminan yang kuat pada keberlanjutan harmoni dan perdamaian. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi yang jamak digunakan dalam pendekatan kualitatif; pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*indepth-interview*) dan studi pustaka (*library research*).

D. Hasil dan Pembahasan.

1. Sekelumit tentang Fakfak

Fakfak adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian leher dari “kepala burung” Pulau Papua yang saat ini menjadi bagian dari Propinsi Papua Barat. Fakfak adalah salah satu kabupaten tertua di Papua bersama delapan kabupaten lainnya yang pertama kali dibentuk pemerintah Indonesia. Di era kolonialisme Belanda, Fakfak bersama Manokwari dikenal sebagai dua pusat pemerintahan yang disebut *Afdelling*. Bahkan bila

ditarik jauh ke belakang, pada masa kerajaan Majapahit, khususnya masa pemerintahan Hayam Wuruk, Papua telah dianggap sebagai bagian dari Wilayah negara nusa Majapahit. Hal ini tercatat dalam Kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Pujangga Prapanca tahun 1365, dalam Kidung 13 dan 14 yang secara khusus memuat nama-nama daerah yang berada di bawah kedaulatan Majapahit dan salah satu daerah di antaranya adalah Wwanin atau Fakfak saat ini (Onim, 2007).

Posisi Fakfak yang menghadap langsung ke Maluku, laksana sebuah pintu gerbang yang menyambut mereka yang akan berkunjung ke Papua. Letaknya yang strategis dengan pelabuhan laut terbaik, memudahkan kapal dagang dari berbagai negeri bisa bersandar dalam berbagai jenis cuaca. Tidak mengherankan bila sejak abad ke-15, Fakfak merupakan wilayah utama dan terdepan di Papua yang telah dikunjungi oleh orang luar dari berbagai daerah dengan beragam kepentingan. Ada yang berkunjung untuk kepentingan ekonomi, ekspansi politik, pengambilan budak hingga penyebaran agama.

Berdasarkan data BPS 2013, jumlah penduduk Fakfak 71.069 jiwa. Terdapat lebih dari 14 suku bangsa hidup di Fakfak, terdiri bangsa pribumi dan pendatang yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Fakfak (53,80%), setelah itu agama Kristen (28,35%) dan Katolik (17,59%) (BPS Fakfak, 2013). Namun berbagai perbedaan tersebut tidak memicu konflik atau ketegangan antara agama, etnis dan budaya. Justru hubungan sosial antar masyarakat terjadi dalam relasi yang harmonis dan damai. Jarang terjadi konflik dalam skala besar

seperti yang terjadi di tempat lain di Papua, meskipun pada tingkat tertentu potensi konflik selalu ada.

2. Dominasi Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial.

Masyarakat Fakfak adalah masyarakat yang komunal, mereka sangat mementingkan hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Pada mulanya hubungan persaudaraan itu hanya mengikat antara keluarga kemudian berlanjut antara suku lalu menjadi persaudaraan dalam satu wilayah geografis. Faktor sejarah tentang peperangan, permusuhan dan pengayuan (kanibalisme) antar suku dan kelompok yang menjadi dasar persaudaraan tersebut. Penguatan hubungan persaudaraan diyakini sebagai jalan untuk memelihara perdamaian dan menghadapi kekuatan musuh yang mungkin akan datang dari luar.

Kehadiran agama Islam sejak abad ke 16 dan Kristen serta Katolik pada abad ke-19 (Onim, 2007) dan perjumpaannya dengan tradisi dan budaya Fakfak justru melahirkan sejumlah nilai dan norma sosial yang mengikat masyarakat Fakfak dalam keseimbangan. Masyarakat tidak ingin penetrasi agama memecah belah hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang telah terbentuk di antara mereka sejak lama. Maka terbentuklah tradisi agama keluarga, yang meyakini bahwa meskipun dalam satu keluarga ada perbedaan agama, tetapi mereka merasa harus tetap menjadi keluarga yang utuh. Maka perbedaan agama tidak menjadi soal bagi masyarakat di Fakfak.

Dari pemahaman ini muncul filosofi dan kearifan lokal yang disebut Satu Tungku Tiga Batu, sebagai lambang harmoni sosial di antara masyarakat. Secara sederhana filosofi Satu Tungku Tiga Batu adalah gambaran kultural tentang persaudaraan masyarakat Fakfak. Dalam konstruksi tradisional masyarakat Fakfak, Satu Tungku Tiga Batu menggambarkan keseimbangan, ibarat satu tungku yang ditopang oleh tiga batu saat memasak makanan oleh orang-orang zaman zaman dahulu. Tanpa tiga kaki dari batu, tungku tersebut tidak akan stabil dan mengakibatkan masakan akan mudah tumpah. Tiga batu ini diibaratkan sebagai tiga agama besar yang berada di Fakfak yaitu agama Islam, Katolik dan Protestan (Iribaram, 2011). Dalam pemikiran masyarakat adat Fakfak, kalau tiga kaki dari batu itu stabil maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik, sehingga implementasi dari filosofi satu tungku tiga batu dimaknai bukan saja dalam kehidupan bergama tetapi menjangkau hingga semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar dari satu tungku tiga batu sebagaimana tertuang dalam bahasa *Baham-Iha* adalah tentang cinta kasih (*idu-idu*), perdamaian (*mani nina*) dan kerukunan (*yoyo*). *Idu-idu* adalah pandangan bahwa semua orang Fakfak harus membangun cinta kasih di antara mereka. Semua masalah harus diselesaikan dengan menanggalkan emosi dan menumbuhkan semangat cinta kasih yang menjadi dasar dari persaudaraan sejati. Sedangkan *Mani Nina* adalah pandangan bahwa tujuan hidup seseorang di dunia ini adalah untuk menciptakan perdamaian. Sehingga bagi masyarakat Fakfak, hanya orang-orang yang bisa menjaga perdamaian di dunia ini yang bisa memperoleh kedamaian di alam sesudah mati

(akhirat). Adapun *Yoyo* adalah pandangan tentang kerukunan yang menjadi tanggung jawab semua orang Fakkak (wawancara dengan Jubair Hubrow, 6 November 2013).

Beberapa praktik sosial yang melambangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat dilihat pada seremoni penyambutan Salib Tuhan Yesus yang melibatkan semua kelompok agama di Fakkak. Setiap hari besar agama seperti Lebaran dan Natal dirayakan dengan penuh kegembiraan, saling mengunjungi dan mengirim makanan dan hadiah. Demikian pula pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan tradisi *baku bantu/masohi* atau gotong royong di antara umat Islam dan Kristen. Tidak jarang seorang Kristen menjadi ketua pembangunan masjid, dan juga sebaliknya. Mereka menganggap agama yang mereka anut bukanlah alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaran di antara mereka. Maka dengan mudah kita bisa menemukan sebuah keluarga yang terdiri dari ketiga agama; Islam, Kristen dan Katolik. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Simon Hindom sebagai berikut:

“Di keluarga saya, delapan bersaudara, ada yang menjadi Kristen, ada yang Islam, dan Katolik. Ada saudara saya haji, ponakan saya bahkan ada yang jadi pastor. Dalam tradisi kami di sini, sudah terbiasa berbagi agama, asalkan ikhlas dan taat. Jadi, misalnya karena pernikahan seorang perempuan terpaksa menjadi mualaf. Maka, nanti salah satu anaknya disarankan ikut agama Kristen atau Katolik. Ini demi kebersamaan”

(wawancara dengan Simon Hindom, 28 Oktober 2013).

Beragam Kerukunan Umat Beragama di Fakkak ditampilkan dalam gambar-gambar berikut ini;



Gambar 01. Keterlibatan Umat Islam pada Penjemputan Salib (Sumber: Dokumentasi peneliti)



Gambar 02. Arsitektur Masjid Tua Pattimburak yang menyerupai Gereja (Sumber: Dokumentasi peneliti)



Gambar 03. Arsitektur Gereja Tua Danaweria yang menyerupai Masjid (Sumber: Dokumentasi peneliti)



Gambar 04. Gambar di Mimbar Masjid yang menyerupai Salib (Sumber: Dokumentasi peneliti)

Satu Tungku Tiga Batu merupakan hasil akulturasi antara adat dan agama dalam masyarakat Fakkak yang melahirkan nilai-nilai toleransi, kerukunan dan kesediaan untuk menerima perbedaan. Melalui tradisi ini semua sengketa dan pertentangan dalam masyarakat Fakkak selalu diselesaikan dengan cara-cara dialogis yang dikenal dengan istilah dudu tikar. Dalam tradisi dudu tikar, semua masalah harus diselesaikan secara damai dan keluarga, karena berakar dari filosofi; *Idu-idu*, *Mani Nina* dan *Yoyo* yang telah disebutkan di atas. Tradisi dudu tikar adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai tersebut, agar masyarakat Fakkak bisa terus hidup penuh cinta, rukun dan damai dengan sesama saudaranya.

Fenomena masyarakat Fakkak memperlihatkan bahwa integrasi sosial yang melintasi batas-batas agama dan budaya dapat terjadi dengan baik karena dibingkai dalam pemahaman kultural dan religiusitas masyarakat setempat yang melahirkan nilai-nilai lokal sebagai norma bersama. Nilai tersebut tergambarkan dari filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* yang diterima semua masyarakat sebagai pedoman dalam membangun hubungan anatar sesama. Bahwa setiap orang boleh memiliki agama yang berbeda, berasal dari etnis yang berbeda, memiliki kepentingan politik yang berbeda tetapi mereka wajib saling menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai lokal yang menyatukan masyarakat seperti itu yang kemudian disebut *Biku Parekh* sebagai moral contract (Parekh, 2008). Moral contract adalah syarat penting untuk mengukuhkan integrasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Kesadaran terhadap nilai-nilai moral yang mendasar dalam masyarakat akan mempengaruhi praktik sosial, sehingga terjadi

dalam relasi yang harmonis dan seimbang sehingga tidak terjadi konflik. Antropolog Amerika Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (1953) menyebut kondisi yang demikian itu sebagai *cultural-determinism* bagi masyarakat setempat, yaitu ketika dinamika sosial masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya hubungan antara agama dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang ambivalen. Agama dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memiliki wilayah yang bisa saling tumpang-tindih. Kenyataan tersebut tidak selalu menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya atau sebaliknya. Sehingga dalam masyarakat Fakfak, agama dan budaya bisa menyatu dan menjadi dua unsur penting yang berperan dalam mempengaruhi aktivitas masyarakat. Seperti kajian Weber (1958) tentang etika Protestan dan munculnya kapitalisme di Eropa Barat, ataupun kasus agama Sinto dan budaya disiplin pada masyarakat Jepang. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik-menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Proses akulturasi antara agama budaya lalu melahirkan serangkaian norma sosial yang disebut Piere Bourdieu (1983) sebagai *habitus* yang melahirkan praktik-praktik sosial. *Habitus* itulah yang menjadi struktur mental atau kognitif, yang dengannya orang-orang di Fakfak berhubungan dengan dunia sosial yang kompleks, dan terkadang antagonistik.

3. Proses Pelembagaan Nilai dalam Integrasi Sosial di Fakfak

Dalam kasus masyarakat Fakfak, proses pelembagaan nilai dan norma dapat ditemukan pada dua bentuk; pertama, semangat agama keluarga yang melahirkan *Satu Tungku Tiga Batu* yang kemudian diadopsi sebagai spirit dalam hampir semua aktifitas sosial, keagamaan, politik bahkan ekonomi. Inilah yang disebut norma sosial yang melembaga (*institutionalize*). Pemerintah adalah salah satu agen utama yang mengadopsi filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* sebagai asas untuk membentuk kehidupan politik di Fakfak yang seimbang dan harmonis. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga memandang perlu untuk melembagakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik. Dalam ranah politik lokal di Fakfak, muncul konsensus politik untuk membagi jabatan-jabatan politik berdasarkan kekuatan-kekuatan lokal; agama dan etnis. Bila bupati adalah seorang Muslim, maka wakil bupati harus berasal dari kalangan Kristen atau Katolik. Demikian juga pada jabatan-jabatan SKPD dan birokrasi daerah, termasuk rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) juga memberi tempat kepada marga-marga asli orang Fakfak dan para pendatang.

Model politik akomodasi seperti ini memungkinkan kekuatan-kekuatan politik di Fakfak tetap terakomodir dan tidak ada yang merasa ditinggal, sehingga meminimalisir potensi konflik. Namun secara faktual politik bagi-bagi jabatan berdasarkan agama ini rawan disalahgunakan oleh para aktor politik lokal dalam perebutan jabatan politik. Kasus perselisihan personal antara bupati

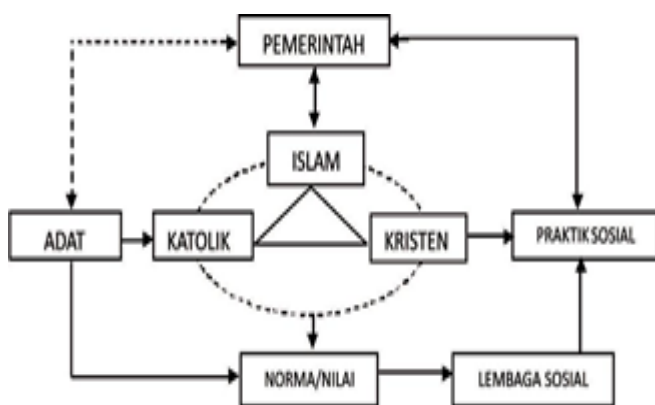
Uswanas dan wakilnya Nimitkendik beberapa waktu lalu, telah menarik agama ke dalam konflik politik. Hal ini menunjukkan bahwa bila tidak hati-hati, politisasi agama pada tingkat tertentu bisa berpotensi membenturkan kekuatan-kekuatan agama di Fakfak dalam konflik yang tidak diinginkan.

Selain masalah politik, praktik keseimbangan juga diterapkan dalam masalah-masalah ekonomi sehingga memberi tempat kepada etnik lokal dan pendatang untuk berkembang secara bersama-sama. Pembangunan ekonomi di Fakfak didorong untuk membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat asli Fakfak sehingga tidak terlalu tertinggal dari etnis pendatang. Mereka diberi hak monopoli untuk memiliki perkebunan-perkebunan Pala di seluruh Fakfak. Pala menjadi komoditas unggulan yang dikuasai orang-orang Fakfak sejak dahulu, karena ditanam di atas tanah-tanah ulayat yang luas. Hak monopoli ini memberi mereka kemandirian ekonomi ketika berhadapan dengan masyarakat pendatang asal Bugis-Makassar, Cina dan Arab yang agresif dalam aktifitas perekonomian dan perdagangan. Namun untuk memasarkan biji-biji Pala tersebut masyarakat Fakfak bergantung pada pembeli lokal yang biasanya berasal dari etnis pendatang tersebut. Selain membeli Pala dari masyarakat, para pedagang juga mendatangkan berbagai jenis barang dagangan; sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan oleh masyarakat Fakfak. Relasi ekonomi yang demikian itu membentuk suatu bentuk hubungan yang saling membutuhkan (*symbiosis mutualism*) yang pada akhirnya meminimalisir proses permusuhan antara komunitas lokal dengan pendatang. Relasi yang

sama juga bisa ditemukan pada hubungan antara masyarakat lokal dengan masyarakat transmigran dari Jawa. Mereka saling membutuhkan, karena masyarakat transmigran sangat berperan dalam menyediakan berbagai produk pertanian yang menjadi konsumsi utama masyarakat asli Fakfak.

Pemerintah Fakfak juga berperan penting dalam memperkecil potensi konflik dalam hubungan-hubungan ekonomi, dengan mendorong masyarakat asli Fakfak untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi di Pasar. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah menyediakan tempat khusus bagi masyarakat lokal untuk berdagang di Pasar Tumburuni Fakfak. Mereka menyediakan lapak-lapak untuk berjualan berbagai produk pangan lokal dan buah-buah musiman di lantai satu pasar tersebut. Setidaknya kebijakan ini bisa menghindari kecemburuan sosial akibat praktik ekonomi yang hanya dikuasai kelompok pendatang. Di seluruh tempat di Papua, pasar bukan saja menjadi tempat aktifitas ekonomi namun juga telah menjadi arena kontestasi identitas, lokal dan pendatang. Sehingga sering terjadi konflik dan kekerasan yang bermula dari pasar yang dianggap sebagai simbol dominasi. Orang-orang Papua yang hanya bisa membuka lapak di pinggiran jalan sambil memandangi dengan cemburu orang Bugis, Makassar dan Jawa yang menguasai pasar-pasar di Papua. Maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat asli Papua juga memiliki akses dan kekuasaan terhadap pasar untuk menunjukkan bahwa sebetulnya mereka adalah penguasa di pasar dan bukan sekedar jongos dari majikan yang entah datang darimana. Pemerintah Fakfak menyadari situasi tersebut dan membuat kebijakan untuk memberi hak

kepemilikan kepada para pedagang lokal di Fakfak untuk menempati tempat khusus dan strategis di Pasar Tumburuni Fakfak. Hal ini mengurangi potensi konflik sosial karena kecemburuan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang.



△ Toleransi dan Kerukunan
 ○ Lingkaran Nilai-nilai adat dalam Masyarakat

Gambar 05. Skema Pelembagaan Nilai dalam Masyarakat Fakfak

Kedua, proses pelembagaan nilai dalam bentuk yang formal dan terorganisir dapat ditemukan pada aktifitas sejumlah organisasi sosial (*civil society*) yang menjalankan fungsi pengendalian sosial. Lembaga sosial yang demikian itu dapat ditemui pada sejumlah organisasi formal baik yang telah hadir sejak dahulu, maupun yang baru dibentuk untuk menjaga dan mengawasi agar praktik-praktik sosial di Fakfak tetap berada dalam kerangka nilai dan norma lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Lembaga sosial dimaksud adalah:

- 1) Tujuh lembaga adat Pertuanan (kerajaan) yang telah eksis sejak beberapa abad yang lampau, dan memiliki wilayah yang luas dan masyarakat yang majemuk. Raja yang memimpin kerajaan merupakan penguasa kultural yang berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh sebab itu dalam setiap kerajaan, memiliki lembaga pengadilan adat yang mengadili perkara-perkara adat antar warga masyarakat.
- 2) Dewan Adat Baham-Mata dan Pengadilan Adat yang didirikan pada tahun 2007 sebagai organisasi adat hasil output dari implementasi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dewan Adat berperan dalam mengendalikan konflik sosial melalui jembatan aspirasi antara kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan Papua dan Pemerintah. Meskipun pada tingkat tertentu Dewan Adat sering dituduh sebagai kekuatan separatis (Pro-M) di Fakfak, namun mereka telah menjadi katalisator yang baik bagi kelompok-kelompok lokal yang mengusung ide kemerdekaan Papua. Sementara itu lewat Pengadilan Adat, mereka juga berperan dalam menyelesaikan sejumlah sengketa, konflik dan pertentangan antar kelompok.
- 3) Lembaga-lembaga keagamaan, MUI, GKI, GPI, Pastoral dan FKUB telah berperan sebagai kekuatan sosial yang terus mengingatkan umat tentang pentingnya menjaga toleransi, kerukunan dan saling

menghormati di antara umat beragama. Kelompok ini secara spiritual terus memperkuat filosofi satu tungku tiga batu, bukan saja sebagai tanggung jawab sosial tetapi juga sebagai tanggung-jawab keimanan.

- 4) Paguyuban Etnis Nusantara yang terdiri dari berbagai etnis; Sulawesi, Buton Seram, Maluku, Jawa dan Sumatera yang juga memiliki peran dalam membangun saling pengertian antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Fakfak.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki misi yang sama yakni menjaga agar hubungan sosial antara agama, etnis dan budaya di Fakfak tetap berjalan harmonis dan damai. Mereka berfungsi sebagai pengendali sosial dan memastikan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik. Bahkan lembaga adat seperti pengadilan adat memegang peran kunci sebagai resolusi konflik pada tahap yang paling awal, melalui kewenangannya untuk menangani sengketa-sengketa adat, hak ulayat, pelanggaran susila, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga penghinaan agama. Dalam beberapa kasus seperti perkelahian antar kampung, polisi langsung menyerahkan kepada Pengadilan Adat untuk diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian konflik secara kultural tersebut lebih diterima oleh masyarakat adat karena dianggap lebih memuaskan ketimbang penyelesaian melalui mekanisme hukum negara.

Apa yang terjadi di Fakfak menunjukkan bahwa sistem nilai dalam masyarakat dapat berjalan dan fungsional bila menjelma menjadi sistem sosial yang

kuat dan melembaga dalam berbagai arena sosial yang luas. Dalam perspektif reproduksi sosial, seperti yang digambarkan Bourdieu (Harker, 2009) sistem nilai (*habitus*) harus dapat diterima, disepakati, difungsikan dan dapat diterapkan untuk mempengaruhi interaksi sosial dan memelihara keteraturan sosial. Pemikiran semacam ini mengandaikan bahwa arena (*field*) sosial, ekonomi dan politik dapat dipengaruhi (distrukturkan) oleh nilai dan norma atau sebaliknya arena tersebut yang mempengaruhi (menstrukturkan) praktik-praktik sosial. Agar dialektika struktur semacam itu bisa berlangsung secara konstruktif maka, maka dibutuhkan lembaga-lembaga sosial (*civil society*) untuk mempertahankan arena sosial sebagai ruang yang tetap selaras dengan norma-norma sosial masyarakat.

4. Masa Depan Integrasi Sosial di Tengah Perubahan Sosial di Papua.

Masyarakat Fakfak dan segenap kebudayaannya adalah sesuatu yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan sesuai konteks ruang dan waktu. Setiap saat nilai-nilai budaya akan menghadapi tantangan, benturan bahkan kontestasi dengan nilai-nilai yang lain yang datang dari luar. Ataupun nilai-nilai baru yang muncul dari dalam masyarakat sebagai konsekwensi dari proses perubahan itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi beberapa persoalan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Fakfak.

Pertama, penyelesaian berbagai masalah di Papua seperti masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum yang belum tuntas, diyakini

secara struktural maupun kultural akan terus menekan masyarakat Fakfak. Sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Papua Barat, masyarakat Fakfak tidak bisa menghindar dari berbagai problematika yang terjadi di kota-kota besar seperti Jayapura dan Manokwari dan berpengaruh ke banyak daerah di wilayah Papua lainnya. Isu-isu politik seperti separatisme dan otonomi khusus turut membelah masyarakat dalam kelompok yang saling bertentangan. Hal ini tampak dari kehadiran kelompok-kelompok yang semakin militan dalam memperjuangkan hak-hak politik Papua di Fakfak seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) pimpinan Arnoldus Koncu, dan kelompok yang berlawanan seperti Barisan Merah Putih pimpinan Islamil Bauw, serta milisi-milisi sipil yang disponsori aparat keamanan. Sementara itu pemberlakuan Otsus dengan segala implikasinya dan pembangunan yang belum melahirkan kesejahteraan merupakan tantangan bagi setiap usaha untuk menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat Fakfak.

Kedua, potensi konflik keagamaan yang diintrodusir melalui isu Islamisasi dan radikalisme agama yang sedang berlangsung di Papua juga menjadi tantangan di Fakfak. Perubahan demografis dengan meningkatnya populasi umat Islam secara signifikan, ternyata dirasakan sebagai ancaman serius bagi sebagian besar masyarakat Kristen Papua. Sebab bagi sebagian gerakan-gerakan pro kemerdekaan, Islamisasi secara tidak langsung dianggap sebagai proses Indonesianisasi (Warta, 2011). Orang-orang Islam Papua sendiri menyadari konstruksi identitas Papua yang Kristen itu. Saat ini mereka sedang berupaya merekonstruksi kembali

sejarah agama di Papua, bahwa Islam pada dasarnya bukan merupakan agama baru di Papua tetapi justru merupakan agama pertama yang dikenal masyarakat Papua. Klaim ini berdasarkan fakta sejarah yang terus dimunculkan bahwa Islam telah lama hadir, hampir dua abad sebelum agama Kristen masuk ke Papua. Beberapa publikasi yang terkenal misalnya tulisan Toni Wanggai (2009) "*Rekonstruksi Sejarah Masuknya Islam di Papua*", dan tulisan Ali Atwa (2008) "*Islam atau Kristen Agama Orang Papua?*", merupakan upaya intelektual Muslim Papua untuk memperkuat klaim sejarah Islam di Papua. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sendiri pernah membuat penelitian yang diseminarkan pada tahun 2006 tentang sejarah masuknya Islam di Papua. Kesimpulan penting dari seminar tersebut bahwa Islam adalah agama pertama yang masuk ke Papua dan oleh karenanya merupakan agama tuan tanah di Papua. Gugatan terhadap eksistensi agama dan hubungannya dengan konstruksi identitas ke-Papua-an, merupakan suatu kontestasi identitas yang menarik sekaligus mengkhawatirkan karena akan memicu konflik keagamaan di masa yang akan datang.

Fakfak sendiri telah menjadi salah satu mercusuar dakwah Islam di Papua, sehingga banyak orang menyebut Fakfak sebagai "*Serambi Mekah-nya*" Papua. Fakta ini tidak terbantahkan karena dari 71.069 jumlah penduduk Fakfak pada tahun 2012, mayoritas beragama Islam (53,80%), dan sebagian besar di antaranya adalah Muslim pribumi yang cukup taat bahkan sebagian telah menjadi tokoh-tokoh Islam yang populer di Papua. Di sini berdiri salah satu gerakan Islam yang paling agresif dalam dakwah Islam di Papua, yaitu Al-Fatih Kaafah Nusantara (AFKN), sebuah organisasi dakwah yang

didirikan oleh Ustadz Mohamed Zaaf Fadzlan Garamatan, seorang warga asli Fakfak. AFKN memiliki misi untuk melanjutkan proses Islamisasi di Papua yang sempat terhenti oleh misi zending dan kolonialisme Belanda. Bagi beberapa kelompok Kristen di Papua, keberadaan ormas Islam dengan dakwahnya yang semakin marak belakangan ini telah menjadi ancaman bagi Kristen (ICG, 2008).

Kontestasi yang demikian menjadikan hubungan antar agama di hampir seluruh tempat di Papua, termasuk Fakfak menjadi tegang. Padahal sebagaimana telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa Fakfak adalah daerah Muslim terbesar di Papua yang berhasil meletakkan dasar-dasar toleransi yang kuat yang berakar pada kultur dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pertanyaan yang fundamental saat ini adalah bagaimana mempertahankan norma dan kearifan lokal di Fakfak agar tetap fungsional di tengah berbagai tekanan dan proses perubahan sosial yang seringkali tidak bisa dicegah. Dalam beberapa kasus proses integrasi sosial melemah justru sejalan dengan semakin melemahnya nilai-nilai sosial yang selama ini berfungsi sebagai *crosscutting affiliation* dan *crosscutting loyalty* dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana kasus melemahnya tradisi *pela* dan *gandong* yang tidak bisa mengendalikan konflik sosial bernuansa agama di Ambon. Sebagian sosiolog percaya bahwa modernisasi yang melanda Indonesia (termasuk komunikasi dan budaya) menjadi salah satu penyebab bergesernya orientasi nilai budaya seperti *pela* dan *gandong* yang bersifat kultural religius, melemah menjadi bersifat simbolik semata. Hal ini terutama di kalangan anak-anak muda yang tidak memiliki *cultural sense* terhadap kebudayaannya sendiri.

Masyarakat Fakfak membutuhkan strategi bertahan dari globalisasi dan modernisasi yang membawa serta pengaruh-pengaruh buruk bagi eksistensi kebudayaan. Maka masyarakat lokal seperti di Fakfak tidak memiliki pilihan lain, selain melakukan penguatan nilai-nilai budaya, juga perlu beradaptasi secara keratif, sehingga bisa menerima proses perubahan tanpa harus larut dalam perubahan itu sendiri. Masyarakat perlu mengenali lingkungan strategisnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Fakfak bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya justru karena mereka membuka diri terhadap kebudayaan lain. Sehingga berupa-rupa kebudayaan, ideologi dan agama yang masuk ke Fakfak saling berinteraksi dan membentuk kebudayaan Fakfak saat ini. Kehadiran berbagai kelompok pendatang dari Maluku, Sulawesi, Arab dan Cina sejak beberapa abad yang lalu justru telah memperkaya kebudayaan Fakfak. Upaya lainnya adalah melakukan transformasi kultural agar budaya-budaya lokal selalu sesuai dengan semangat zaman. Itu artinya selain membuka diri pada perubahan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan tafsir dan kontekstualisasi terhadap tradisi, budaya, dan adat istiadat yang mungkin dianggap tidak sesuai lagi dengan kehidupan saat ini.

C. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa dinamika sosial di Papua bukan hanya tentang konflik dan kekerasan, sebab kita masih bisa menemukan harmoni dan perdamaian di wilayah-wilayah tertentu di Papua yang menyumbang kepada penguatan integrasi sosial sebagaimana yang terjadi di Fakfak Papua Barat. Masyarakat Fakfak berhasil menjaga wilayahnya untuk tidak jatuh dalam konflik dan anarkisme sebagaimana yang terjadi hampir di semua tempat di Papua. Agama dan budaya telah menjadi faktor determinan yang memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat Fakfak yang majemuk. Integrasi sosial tersebut dibentuk dari akulturasi antara nilai-nilai agama dan budaya yang melahirkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang berbeda agama, etnis dan budaya. Nilai-nilai tersebut kemudian dilembagakan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menjadi norma dan kearifan lokal yang mengikat masyarakat Fakfak dalam satu kesimbangan.

Namun studi ini juga menemukan bahwa harmoni dan perdamaian pada masyarakat Fakfak memerlukan penguatan terus-menerus karena rentan dengan berbagai isu politik di Papua yang pada tingkat tertentu telah memecah masyarakat kedalam kelompok yang saling mengancam, seperti Pro-Merdeka dan Pro-NKRI. Sementara itu, munculnya isu Islamisasi yang didukung oleh kehadiran kelompok-kelompok keagamaan yang radikal dengan jaringan yang semakin meluas dan tidak toleran pada perbedaan agama, seperti HTI, Lasykar Jihad dan AFKN serta gereja-gereja ekstrim dari kalangan Kharismatis dan Pantekosta juga patut di perhatikan. Oleh sebab itu, masyarakat

Fakfak dan institusi sosial di sana perlu diperkuat untuk mempertahankan harmoni dan keragaman di tengah berbagai tekanan yang ada. Mungkin diperlukan kreatifitas dalam beradaptasi dan kemampuan melakukan transformasi agar nilai-nilai lokal tetap aktual di tengah berbagai perubahan.
Semoga!

Daftar Pustaka

- Bertrand, Jacques. 2004. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Newyork: Cambridge University Press
- Bourdieu, Pierre 1991. *Language and Symbolic Power*. Massachusetts: Harvard University Press
- _____. 1997. *Outline of a Theory of Practice*. United kindom: Cambridge University
- Ernas, Saidin. 2006. "Perjanjian Malino dan Penyelesaian Konflik Mauluku". Tesis Magister pada Program Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Harker, Richard, (ed). 2009. *(Habitush x Modal)+Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasustra
- Iribaram, Suprpto. 2011. "Satu Tungku Tiga Batu" (Kerjasama Tiga Agama dalam Kehidupan Sosial di Fakfak). Yogyakarta: Tesis Magister pada Program Pascasarjana Antropoli Universitas Gadjah Mada
- Nugroho, Heru. 1999. "Konstruksi Sara, Kemajemukan dan Demokrasi", *UNISIA*, No.40/XXII

- Onim, J.F. 2006. "Islam dan Kristen di Tanah Papua".
Jurnal Info Media
- Parekh, Biku. 2008. *A New Politics of Identity*. New York: Palgrave Macmillan
- _____. 2008. *Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius
- Pranawati, Rita (ed.). 2011. *Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial*. Jakarta: Center for Study of Religion and Culture (CSRC)
- Putuhena, Saleh. 2006. *Studi Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*. Diproduksi oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta; Rajawali Press, 1992
- Rizer, George dan Goodman, Dauglas J. 2009 *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen* (terj. Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Takwin, Bagus. 2009. "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam ilmu Sosial, Pengantar, dalam Richard Harker, (ed.), *(Habitush x Modal)+Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Warta, Cristian. 2006. "Perkembangan Masalah Agama di Papua: Sengketa antar Agama dan Pencegahan Konflik", dalam Fajar Ibnu Tufail (edit.), *Politik Identitas Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Widjoyo, Muridan S. 2009. *Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan TIFA.
- Wanggai, Toni Victor M. 2009. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.